



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

TESIS

**KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS DOKUMENTASI TRANSFER PRICING
STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Magister Sains (M.Si)
Dalam Ilmu Administrasi**

Oleh :

Nama : MAHARSI DEWANTO

NPM : 690503115Y

**Program Studi Ilmu Administrasi
Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan**

**JAKARTA
2008**

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICS SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINSTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
ADMINISTRATIVE STUDY PROGRAM
MAJORING ADMINISTRATIVE AND TAX POLICY

ABSTRACT

MAHARSI DEWANTO
690503115Y

TRANSFER PRICING DOCUMENTATION POLICY
A COMPARATIVE STUDY

xvi+ 100 pages + 3 tables

Bibliographies : 56 text books (1982-2007), 16 journals/articles, 1 regulations

Transfer pricing is often used by multinational company for the interests of its global business strategies by manipulating it. This manipulation is potential to reduce a country tax basis that come from a group of multinationals company operating in that country.

Transfer pricing manipulation has many implications, especially related to disagreement between tax authority and tax payers. One of them and the most often occurred is a dispute between the two parties during the audit process, whether the transfer pricing decision has met the arm's length principle or not. And if that problem arises, then one of the appropriate tools is to resolve it by the transfer pricing documentation.

A regulation of transfer pricing documentation is a must because it is needed by both parties. On the one side, tax authority must have a guideline on the documents that must be reasonably available when performing audit because tax authority can not unilaterally asking all the documents without considering the tax payer's compliance cost. On the other side, tax payer has many benefits that can be obtained because the transfer pricing documentation is the basis for the legal transfer pricing decision ; as a substantial data to fill Appendix 3A of the Annual Tax Return of Corporate Income Tax ; as a media to explain the transaction between related parties ; as a supporting document to face the tax audit ; or as a reference when applying for an objection /

appeal / cassation, and last but not least, is for evidence when the two parties have a case in the court

Stepping from the analysis on OECD Guidelines, PATA Documentation Package and EU TPD, and comparative study on six (6) countries and provided with information from the key informant, several points that can be made as references in compiling the regulations on transfer pricing documentation in Indonesia are obtained, they are : the need on adopting OECD Guidelines as a reference for the regulations to have global context, giving confirmation on when the transfer pricing documentation must be available (contemporaneous documentation), giving clarity on who is responsible to bare the burden of proof concerning whether the transfer price has met the arm's length principle, assuring that the content of the regulations is giving a balance between the need of tax authority and the liability that must be borne by tax payer, and giving clarity about the penalty for not making the transfer pricing documentation.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

MAHARSI DEWANTO
690503115Y

KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS DOKUMENTASI TRANSFER PRICING STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

xvi+100 halaman+3 tabel

Bibliografi : 56 buku literatur (1982-2007), 16 jurnal/artikel, 1 peraturan

Transfer pricing sering digunakan perusahaan multinasional untuk kepentingan strategi bisnisnya secara global dengan cara memanipulasinya. Manipulasi *transfer pricing* ini berpotensi mengurangi basis pajak suatu negara yang berasal dari grup perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut.

Manipulasi transfer pricing memiliki banyak implikasi, terutama yang terkait dengan ketidaksepahaman antara otoritas pajak dan wajib pajak. Salah satunya dan yang paling sering terjadi adalah perbedaan pendapat pada saat dilakukan audit tentang apakah penentuan harga transfer telah memenuhi prinsip harga pasar wajar. Dan jika masalah tersebut muncul, maka "alat" yang paling tepat untuk menyelesaikannya adalah dokumentasi *transfer pricing*.

Regulasi tentang dokumentasi *transfer pricing* yang baik adalah suatu kebutuhan, karena diperlukan oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, otoritas pajak harus memiliki batasan tentang dokumen yang secara wajar harus tersedia jika melakukan audit, karena tidak bisa secara sepihak meminta semua dokumen yang "diinginkannya" tanpa memperhatikan biaya kepatuhan yang harus ditanggung wajib pajak. Di sisi lain Wajib Pajak memiliki banyak manfaat yang bisa diperoleh, karena dokumentasi transfer pricing adalah dasar bagi penentuan harga transfer yang benar, sebagai bahan untuk pengisian Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan, sebagai media untuk menjelaskan hubungan istimewa antar pihak yang bertransaksi, sebagai pendukung untuk menghadapi pemeriksaan pajak, atau sebagai referensi jika mengajukan keberatan/banding/kasasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai alat bukti jika berperkara di pengadilan.

Berangkat dari kajian terhadap OECD Guidelines, PATA Documentation Package dan EU TPD, serta analisis perbandingan terhadap enam (6) negara dan dilengkapi informasi dari nara sumber, diperoleh beberapa poin yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun regulasi dokumentasi transfer pricing di Indonesia, yaitu : perlunya mengadopsi OECD Guidelines sebagai rujukan agar regulasi memiliki konteks global, memberi penegasan tentang saat dokumentasi transfer pricing harus tersedia, memberi kejelasan tentang siapa yang harus menanggung beban pembuktian apakah harga transfer yang ditentukan wajib pajak telah memenuhi prinsip harga pasar wajar, memastikan bahwa isi/ketentuan dari regulasi dokumentasi transfer pricing memberi keseimbangan antara kebutuhan otoritas pajak dan beban yang harus ditanggung wajib pajak, memberi kejelasan apakah wajib pajak yang tidak membuat dokumentasi transfer pricing perlu diberi sanksi.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN



TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Maharsi Dewanto
NPM : 690503115Y
Judul : Ketentuan Perpajakan Atas Dokumentasi Transfer Pricing
Studi Perbandingan Dengan Negara Lain

Pembimbing

(Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak)

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Maharsi Dewanto
NPM : 690503115Y
Judul : Ketentuan Perpajakan Atas Dokumentasi Transfer Pricing
Studi Perbandingan Dengan Negara Lain

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu delapan dan telah dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

Ketua Sidang

Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)

Pembimbing

Prof Dr. Gunadi, M.Sc, Ak (.....)

Pembaca Ahli

Drs. Iman Santoso, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang:

Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memperkenankan penulis menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Program Pasca Sarjana FISIP UI Jakarta dan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si).

Tesis ini walau dibuat dengan kesungguhan hati dan sepenuh upaya penulis, namun tetap dirasa jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis sangat mengharap sumbang saran dan kritik membangun, sehingga perbaikan pemahaman akan makin menyempurnakan penelitian ini di masa mendatang.

Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Gunadi M.Sc, Ak, selaku pembimbing penyusunan tesis, yang ditengah segala kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk dengan cermat dan sabar mengarahkan dan membimbing penulis,
2. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, sekaligus Ketua Sidang Penguji Tesis,
3. Drs. Iman Santoso, M.Si, selaku Pembaca Ahli dalam sidang tesis,
4. Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Sidang,

5. Seluruh staf sekretariat program, terutama Mas Deni dan Mbak Ninik, staf perpustakaan, terutama Mas Pri dan Mas Pur atas semua bantuannya yang telah sangat memudahkan studi penulis,
6. Darussalam dan Danny Septriadi, sahabat sekaligus mentor penulis, atas pencerahan dan *supportnya* yang luar biasa,
7. Kepala Seksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus Lainnya KP DJP, Edward, H. Sianipar, atas ide dan dorongannya untuk menulis tesis ini,
8. Drs. Harri Hermawan Soelias, Ak. MBA, selaku Kepala Kantor dan rekan rekan Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Dua atas *support* dan kerjasamanya selama pembuatan tesis ini,
9. Bapak dan Ibunda tercinta, Mbak Ika, Mas Yudi, Mbak Anna, Bang Rully, Bang Imam, Dik Shinta, dan Konas beserta seluruh keluarganya masing – masing atas doa tulus dan *supportnya* yang tak pernah putus dan sangat luar biasa,
10. Terakhir, yang sangat penulis cintai, Husnul Azizah dan ketiga titipan Allah yang sangat luar biasa, Satrio, Dimas, dan Wulan, yang doa, senyum dan spanya adalah kekuatan dan keajaiban dalam hidup penulis,
11. Tidak ketinggalan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memungkinkan selesainya penulisan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Terima kasih.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Abstrak.....	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	v
Lembar Persetujuan Tesis.....	vi
Lembar pengesahan tesis.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN.....	9
A. Tinjauan Literatur.....	9
A.1 Pengertian Transfer Pricing.....	9
A.2 Prinsip Arm's Length Price.....	11
A.3 Burden of Proof (Beban Pembuktian).....	12

A.4	Sisi Akuntansi Transfer Pricing.....	13
A.5	Strategi Transfer Pricing.....	15
A.6.	Dokumentasi Transfer Pricing.....	15
A.6.1	Definisi dan Arti Penting Dokumentasi Transfer Pricing	15
A.6.2	Dokumentasi Transfer Pricing Menurut Organisasi Multilateral (OECD, PATA dan EU TPD).....	18
A.7	Penelitian Terdahulu.....	23
A.8	Kerangka Pemikiran.....	24
B.	Metode Penelitian.....	27
B.1	Pendekatan Penelitian.....	27
B.2	Jenis/Tipe Penelitian.....	28
B.3	Metode dan Strategi Penelitian.....	28
B.3.1	Pengumpulan Data.....	28
B.3.2	Sumber Data.....	29
B.4	Nara sumber/Informan.....	30
B.5	Proses Penelitian.....	30
B.6	Lokasi dan Obyek Penelitian.....	31
B.7	Keterbatasan Penelitian.....	31
BAB III	DOKUMENTASI TRANSFER PRICING DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA.....	32
A.	Latar Belakang.....	32
B.	Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia.....	36
C.	Dokumentasi Transfer Pricing di Afrika Selatan.....	40
D.	Dokumentasi Transfer Pricing di Amerika Serikat.....	42

E. Dokumentasi Transfer Pricing di Australia.....	46
F. Dokumentasi Transfer Pricing di Inggris.....	51
G. Dokumentasi Transfer Pricing di Jepang.....	56
H. Dokumentasi Transfer Pricing di Singapura.....	58
I. Hasil Wawancara.....	62
BAB. IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	63
A. Perlu Tidaknya Mengadopsi OECD Guidelines.....	64
B. Contemporaneous Documentation.....	67
C. Beban Pembuktian (Burden of Proof).....	73
D. Isi dari Regulasi Dokumentasi Transfer Pricing.....	75
D.1 Persyaratan Keharusan Adanya Dokumentasi Transfer Pricing.....	63
D.2 Jenis Dokumen yang Dipersyaratkan.....	78
D.3 Bahasa yang Dipersyaratkan dalam Dokumentasi.....	88
D.4 Jangka waktu yang Dipersyaratkan Untuk Penyerahan Dokumen.....	90
E. Sanksi Khusus Atas Tidak Dibuatnya Dokumentasi Transfer Pricing.....	92
F. Lain – Lain.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	99



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Rencana PMA yang Disetujui Pemerintah Menurut negara Asal (juta USD)	33
Tabel 2.	Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan (juta USD)	34
Tabel 3.	Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Asal (C&F) (juta USD)	35



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Kerangka Pemikiran Penelitian	26
Gambar 2	Matriks Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia	37
Gambar 3	Matriks Dokumentasi Transfer Pricing di Afrika Selatan	41
Gambar 4	Matriks Dokumentasi Transfer Pricing di AS	44
Gambar 5	Matriks Dokumentasi Transfer Pricing di Australia	48
Gambar 6	Matriks Dokumentasi Transfer Pricing di Inggris	53
Gambar 7	Matriks Dokumentasi Transfer Pricing di Jepang	57
Gambar 8	Matriks Dokumentasi Transfer Pricing di Singapura	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007 tentang *Tatacara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007*
- Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan Form 1771-I
- Pedoman Wawancara
- Resume wawancara
- Daftar Riwayat Hidup

